

Keluar dari Ketergantungan Asing

Rabu, 18 November 2015 | Dibaca 379 kali

Oleh: DR Muammar Khadafi SE Msi Ak

Cakupan ekonomi yang global, tentu tidak pernah terlepas dari kebijakan politik ekonomi luar negeri suatu negara. Negara memiliki peran yang sangat dominan menentukan arah kebijakan, terlebih lagi kebijakan ekonomi yang nantinya berimbas pada pembangunan negara. Beberapa kebijakan ekonomi negara Indonesia lebih memperkuat kearah hubungan multilateral, buktinya dengan menjadi anggota WTO dan yang terbaru isu bergabungnya Indonesia menjadi peserta Trans Pasific Partnership (TPP) yang digagas Obama meskipun mendapat kritik dari Republiken dan sebagian Demokrat yang merupakan partai asal Obama. Tujuan pendirian TPP sendiri adalah untuk menjadi penyeimbang dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasific (Analisa, 27/10). Melihat dominasi tersebut, maka Amerika Serikat tidak mau kehilangan pasar yang besar di kawasan Asia, sehingga perlu ada tandingan dari hegemoni Tiongkok.

Berbicara mengenai politik ekonomi, tentu harus memahami dasar dari kebijakan internasional suatu negara. Pada intinya, negara maju memiliki kepentingan yang besar terhadap negara berkembang, dan sebagian besar negara di Asia merupakan negara berkembang, dan menjadi mangsa pasar terbesar negara maju. Penulis menyebutnya kolonialisme pasar. Sejak berakhirnya perang dunia, dimana perebutan wilayah menjadi orientasi dari peperangan yang terjadi, kini terjadi perubahan besar, dari perebutan wilayah menjadi perebutan pasar. Negara maju berjuang keras untuk melakukan intervensi, baik melalui perjanjian maupun pinjaman terhadap negara maju agar memiliki ketergantungan, baik ketergantungan ekonomi atau pertahanan.

Inilah sebab banyak negara maju menginisiasi pendirian perjanjian internasional. Lantas dimanakah peran negara berkembang? Jawabannya adalah peran negara berkembang hanya sebagai pasar dari produksi negara maju, dengan demikian perdagangan internasional memiliki tempat untuk menjual produk yang dihasilkan negaranya. Dan apakah ada hubungan timbal baliknya sebagai anggota perjanjian internasional? Tentu saja ada, seperti di WTO setiap negara anggota dapat mengekspor komoditas industrinya ke sesama negara anggota dengan bea yang telah ditetapkan bersama dalam kesepakatan, tidak boleh ada diskriminasi, namun tentu akan sulit sebagai negara berkembang untuk mengekspor produknya ke negara maju, karena negara maju akan memroteksinya dengan berbagai cara yang tidak melanggar perjanjian, seperti standart mutu dan teknologi yang tentu tidak semua negara berkembang memilikinya.

Kembali ke masalah politik ekonomi, Indonesia sebagai negara besar, kaya sumber daya namun minim teknologi dan minim dana, sebab perkembangan industri dalam negeri tidak progresif berkembang, sehingga kesempatan ini menjadi peluang negara maju untuk ambil bagian, dan tentu saja ada dilematis. Namun bujukan negara maju yang menggiurkan tidak dapat ditolak, seperti pinjaman dan hibah bantuan, tentu ada timbal baliknya, yaitu kesepakatan apapun yang dibuat oleh negara pemberi harus dipatuhi, jika tidak ada sanksi berupa pembatalan pinjaman dan bahkan masuk dalam list hitam. Ketergantungan yang sudah ditanamkan membuat pergerakan negara berkembang menjadi sempit, dan itu artinya kolonisasi sudah dimulai.

Menggadai *State Sovereignty*

Kedaulatan negara (*State Sovereignty*) tentu menjadi harga diri suatu bangsa, dan bukti kekuasaan negara dalam memerintah negaranya, namun kedaulatan tersebut hanya berlaku internal. Negara berkembang mau tidak mau harus menggadaikan kedaulatan negaranya, dan jika tidak, maka negara maju tidak akan mau memberikan bantuan. Kasus yang sampai sekarang masih berjalan adalah tergadainya kedaulatan negara memberikan keputusan perpanjangan kontrak karya perusahaan asing. Contohnya Freeport yang akan habis

masa kontraknya pada 2021 nanti. Saat ini renegotiasi belum sepenuhnya berjalan, namun pihak freeport mengabarkan ada perpanjangan kontrak hingga 2041 mendatang. Tentu bila dikaitkan dengan kehadiran Jokowi di Amerika dan rencana bergabung ke TPP, maka sinyal tersebut bisa saja terjadi.

Perang Raksasa Ekonomi

Indonesia dulu pernah terjebak peperangan dan sepakat mendirikan gerakan nonblok, namun saat ini Indonesia kembali terjebak peperangan dua raksasa ekonomi, Amerika dan Tiongkok, namun Indonesia tidak mendirikan gerakan nonblok melainkan berusaha merangkul keduanya. Secara politik, hal ini benar dilakukan, karena memang negara ini butuh kedua negara tersebut.

Sejak Tahun 2010 hingga kuartal-III 2015, investasi Amerika Serikat di Indonesia sebesar US\$ 8,0 miliar, di mana lima sektor terbesar adalah pertambangan US\$ 7,2 miliar, perdagangan/reparasi US\$ 258 juta, industri makanan US\$ 167 juta, industri alat angkut US\$ 142 juta, dan industri kimia/farmasi US\$ 56 juta. Saat ini

rencana investasi Amerika ke Indonesia masing-masing adalah sektor makanan, minuman dan tembakau sebesar US\$ 1 miliar dalam bentuk perluasan investasi, kelistrikan US\$ 600 juta, hilirisasi sektor agro sebesar US\$ 750 juta, industri alat berat/permesinan US\$ 12 juta, serta sektor kertas dan percetakan, masing-masing dalam bentuk statement of investment (Beritasatu 27/10).

Sementara Tiongkok menurut data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asal Tiongkok pada tahun 2014 mencapai angka US\$ 800 juta dengan 501 jumlah proyek investasi, atau menduduki peringkat ke-delapan dari keseluruhan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total nilai US\$ 28,53 miliar. Sedangkan pada kuartal I 2015 sendiri nilai investasi Tiongkok berjumlah US\$ 75,1 juta atau 1,14 persen dari total PMA senilai US\$ 6,56 miliar. Dengan demikian, Indonesia tetap bergantung pada kepada investasi dua negara tersebut.

Kemandirian Lokal

Jika sudah terjebak dalam arus globalisasi ekonomi, maka Indonesia tidak mampu berbuat banyak. Menggenjot industri dalam negeri juga bukan ibarat sulap, sementara ketergantungan yang semakin tinggi tentu mengancam kemandirian ekonomi lokal terhadap negara maju. Salah satu upayanya hanyalah menciptakan perimbangan kondisi perekonomian nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap negara maju. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan daya jual bahan ekspor dari hanya mengekspor bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, sehingga memiliki nilai lebih dan tentu akan ada perimbangan nilai ekspor terhadap nilai impor. Komoditas ekspor Indonesia harus memiliki nilai tinggi, hal ini memerlukan dukungan teknologi, sehingga selain berkualitas tinggi, juga harus *low cost*, tentu cara menekan biaya produksi jangan meniru Tiongkok dengan membayar harga buruh rendah, namun lebih menekankan teknologi, sehingga mampu menekan biaya tersebut.

Perlahan tapi pasti, ketergantungan akan dapat dirubah, memang bukan dalam waktu singkat, namun perlahan tapi pasti, Indonesia hanya perlu terus belajar dan berhati-hati terhadap jebakan investasi, maupun jebakan perjanjian asing.

Terkait wacana keikutsertaan Indonesia di TPP perlu difikirkan kembali, melihat sejauh ini kerjasama internasional malah tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi. Ukuran perkembangan ekonomi bukan dilihat dari seberapa besar investasi asing, namun seberapa besar kemampuan negara ini mengelola potensi yang ada dengan lebih banyak berinvestasi di luar, ekspor produk domestik harus lebih tinggi dari impor, baru Indonesia dapat merubah arah pembangunan lebih baik.***

Penulis adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

